

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PASCA PANDEMI
(Studi Kasus Desa Wisata Panusupan Rembang Purbalingga Jawa Tengah)**

*(Post-Pandemic Tourism Development Strategy
(Case Study of Panusupan Tourist Village, Rembang, Purbalingga, Central Java))*

ISMAN JULIAN^{1*)}, NURUL ANWAR²⁾ DAN BAROKATUMINALLOH²⁾

*Masters Program in Economics, Universitas Jenderal Soedirman
Faculty of Economic and Business Universitas Jenderal Soedirman*

*email korespondensi: Isman.julian@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRACT

Panusupan Tourist Village, one of the tourist villages, has been adversely affected by the COVID-19 pandemic. The essence of post-pandemic tourism development lies in the restoration of tourism activities and the improvement of inactive tourist attractions due to the pandemic. The purpose of this study is to formulate development strategies with a focus on the priority aspects of post-pandemic tourism development. The research employs a descriptive approach, utilizing AHP as the decision-making method. The research findings reveal that the post-pandemic tourism development strategy in Panusupan Village involves reevaluating potentials, identifying opportunities, threats, strengths, weaknesses, and determining priority development aspects. The priority aspect determined through AHP calculations shows that service facilities are the top priority with a priority value of 35%. Institutional aspects follow with 25%, accessibility with 24%, marketing with 11%, and business aspects with 5%

Keyword: *AHP, Tourism Policy, Development Strategy*

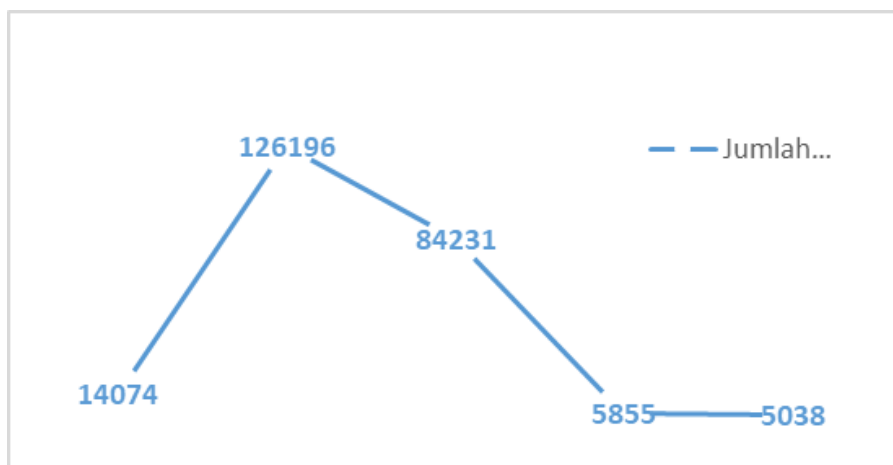
ABSTRAK

Desa Wisata Panusupan salah satu desa wisata yang terdampak akibat dari pandemic covid-19. Esensi dari pengembangan pariwisata pasca pandemic adalah dalam rangka pemulihan kegiatan pariwisata dan memperbaiki kondisi objek wisata yang non aktif akibat dari pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan dengan aspek Prioritas pengembangan pariwisata pasca pandemic. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kuantitatif dan AHP sebagai metode pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengembangan pariwisata di Desa Panusupan pasca pandemic yakni mengidentifikasi kembali potensi, peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dan menentukan aspek prioritas pengembangan. Aspek proritas hasil perhitungan AHP menunjukkan Fasilitas pelayanan merupakan aspek prioritas I dengan nilai prioritas 35%. Kelembagaan 25%, Aksesibilitas 24%, Pemasaran 11% dan Aspek bisnis 5%.

Kata kunci: *AHP, Kebijakan Pariwisata, Strategi Pengembangan*

PENDAHULUAN

Pandemic covid-19 membawa dampak buruk yang signifikan disemua sektor terkhusus sektor pariwisata. Sudah lebih dari 2 tahun, kegiatan dunia pariwisata menjadi sangat lesu akibat dari pandemi. Kebijakan pemerintah membatasi mobilitas masyarakat ditengah pandemic untuk mencegah perluasan virus covid-19 menjadi pukulan bagi para pelaku wisata. Kondisi seperti ini menjadikan banyak destinasi wisata tidak ada *income* pendapatan sehingga berujung ke pemecatan sejumlah karyawan sampai berdampak rusaknya fasilitas wisata akibat tidak adanya pemeliharaan. Desa Wisata Panusupan merupakan salah satu dari sekian banyak desa wisata di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah yang ikut terdampak, desa yang memiliki beragam potensi wisata seperti wisata alam, budaya, religi dan wisata kuliner belakangan ini terbelengkalai akibat tidak adanya pengunjung yang datang.



Gambar 1 Jumlah wisatawan di desa wisata panusupan tahun 2017-2021

Menurut Yoeti (2008) Pemulihan objek pariwisata merupakan proses yang melibatkan serangkaian strategi dan tindakan untuk mengembalikan daya tarik dan fungsi objek wisata yang mengalami penurunan atau kerusakan, baik akibat bencana alam, perubahan lingkungan, atau faktor-faktor lain. Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas maka ada beberapa hal yang akan jadi fokus utama penulis dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan menentukan aspek prioritas tertinggi dalam pengembangan desa wisata panusupan dengan metode Analisis Hirarki Proses (AHP) sebagai alat penentuan keputusan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan sektor pariwisata (Fauzi & Adi Nugraha, 2019). Menurut Yoeti (2008) Pengembangan pariwisata mencakup upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan produk wisata atau menambah jenis produk wisata yang ada.

Analytic Hierarchy Process

Analytic Hierarchy Process merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut (Thomas L. Saaty, 2005) hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
 - Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
- Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sifat data yang dikumpulkan adalah berupa data deskriptif. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif berdasar asumsi bahwa pariwisata tidak cukup hanya dipahami sebagai realitas hitam di atas putih, namun juga harus dianalisis secara realitas kritis, serta dikonstruksi secara lokal dan spesifik (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini semua data yang terkumpul kemudian dianalisa dan diorganisasikan hubungannya untuk menarik kesimpulan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Dengan metode deskriptif kualitatif diharapkan mampu mengetahui Pengembangan Pariwisata Berbasis masyarakat di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

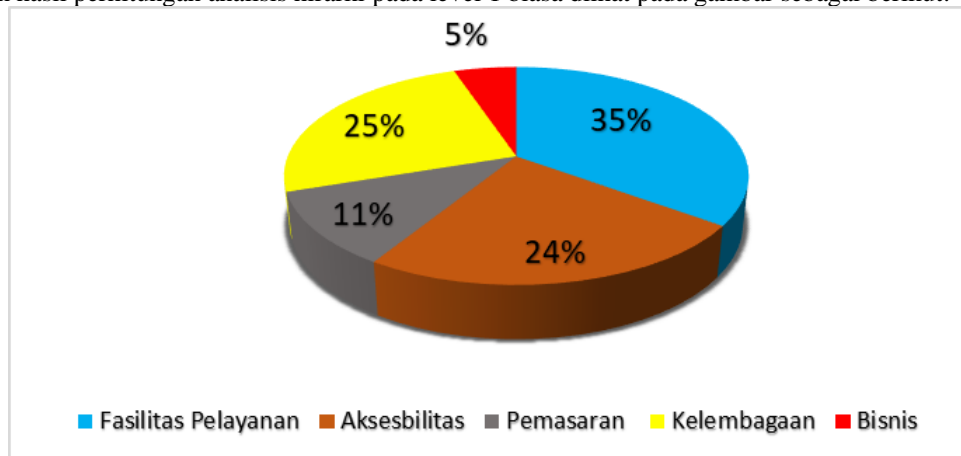
Subjek dalam penelitian ini dibagi dalam 4 Klaster, yaitu: (1) Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga, (2) Pemerintah Desa Panusupan, (3) Pokdarwis Desa Panusupan, (4) Tokoh Masyarakat. Penelitian ini menggunakan analytic Hierarchy Proses (AHP) sebagai alat pengambilan keputusan. *Analytic Hierarchy Process* merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki atau tingkatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa aspek yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan atau perlu dibenahi baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, pokdarwis maupun masyarakat sebagai pelaksana pengembangan pariwisata di Desa Panusupan seperti aspek fasilitas pelayanan, aspek pemasaran, aspek aksesibilitas, aspek kelembagaan dan aspek bisnis.

A. Perhitungan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan aspek prioritas pengembangan pariwisata di Desa Panusupan.

Adapun hasil perhitungan analisis hirarki pada level 1 biasa dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber : Data Primer diolah

Gambar 2. Hasil Perhitungan AHP Level 1

Seperti yang dilihat pada gambar di atas, maka hasil analisis pada level 1 menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan menjadi kriteria yang paling prioritas dengan presentase sebesar 35%. Maka dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan menjadi hal pertama yang paling penting untuk dibenahi. Kriteria kelembagaan menempati posisi prioritas kedua dengan presentase 25%. Bukan hanya di desa wisata panusupan, di desa wisata lainnya kriteria kelembagaan sangat mempengaruhi, di mulai dari kebijakan pemerintah, kurangnya sinergi antar masyarakat dan peran pokdarwis yang belum maksimal adalah faktor penghambat yang harus segera dibereskan atau diperbaiki.

Posisi ketiga atau prioritas ketiga adalah kriteria aksesibilitas dengan presentase sebesar 24%. Aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemdes dan pengelola wisata di Desa Panusupan, karena letak Desa Panusupan yang jauh dari pusat kota dan medan objek wisata yang merupakan dataran tinggi atau pegunungan maka akses yang baik sangat dibutuhkan untuk mempermudah para pengunjung yang berniat berwisata di Desa Panusupan. Sedangkan kriteria pemasaran menempati posisi prioritas keempat dengan presentasi 11% kemudian disusul oleh kriteria bisnis dengan presentase 5%.

Secara keseluruhan hasil analisis hirarki proses (AHP) penentuan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Panusupan bias dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil AHP secara keseluruhan/global prioritas

Kriteria	Level 1		Level 2		
	Bobot	Prioritas	Indikator	Bobot	Prioritas
Fasilitas Pelayanan	35,06	I	Pusat Informasi	8,50	P5
			Pemandu Wisata	6,85	P6
			Toilet Umum	4,36	P12
			Medis	6,13	P7
			Tempat Ibadah	9,21	P4
Aksesibilitas	23,79	III	Jalan	10,12	P2
			Transportasi	3,81	P13
			Petunjuk Jalan	9,86	P3
Pemasaran	10,99	IV	Festival wisata	4,44	P11
			Media sosial	5,41	P10
			Media Cetak	1,13	P16
Kelembagaan	24,99	II	Kebijakan Daerah	5,82	P8
			Pokdarwis	5,62	P9

			Sinergi Masyarakat	13,55	P1
Bisnis	5,17	V	Souvenir Shop	0,48	P18
			Home Stay	1,46	P15
			Warung Makan	0,62	P17
			Paket Wisata	2,61	P14
Jumlah	100,00			100,00	

Sumber : Data Primer diolah.

AHP merupakan alat analisis yang memakai persepsi manusia sebagai inputnya maka ketidakkonsisten mungkin bisa terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten, apalagi untuk membandingkan banyak kriteria. Pengukuran konsistensi ini dimaksudkan untuk melihat ketidakkonsisten jawaban yang diberikan oleh para responden. Jika *Consistensi Rasio* (CR) < 0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada matrik kriteria yang diberikan responden bisa di katakan konsisten.

Jika *Consistensi Rasio* CR > 0,1 maka nilai perbandingan pada matrik kriteria yang diberikan oleh para responden tidak konsisten. CR dapat dikukur apa bila Index Konsistensi (CI) telah diketahui, untuk mengetahui CI Thomas Saaty menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 CI &= (\lambda_{maks} - n)/(n - 1) \\
 &= (5,11 - 5)/(5 - 1) \\
 &= 0,03
 \end{aligned}$$

Keterangan : CI = Indeks Konsistensi

λ_{maks} = eigenvalue maksimum

n=jumlah kriteria

Setelah nilai CI diketahui maka dapat langsung Menghitung rasio konsistensi. Karena AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui suatu. (Saaty, 2005) merumuskan sebagai berikut :

$$CR = CI / RI$$

$$\begin{aligned}
 CR &= (0,03)/(1,12) \\
 &= 0,03
 \end{aligned}$$

Keterangan : CI = Consistensi Rasio

RI = Random Index

Tabel 2. Consistensi Indek dan Consistensi Rasio Hasil perhitungan AHP

Perbandingan berpasangan	Consistensi Index	Consistensi Rasio	Keterangan
Antar ktireria Level 1	0,03	0,03	Konsisten
Antar indikator Fasilitas Pelayanan	0,02	0,01	Konsisten
Antar indikator Aksesibilitas	0,02	0,04	Konsisten
Antar indikator Pemasaran	0,03	0,06	Konsisten
Antar indikator Kelembagaan	0,04	0,06	Konsisten
Antar indikator Bisnis	0,04	0,04	Konsisten

Sumber : Data Primer diolah

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa antar kriteria pada level 1 memiliki nilai CR sebesar 0,03 yang artinya perbandingan antara kriteria level 1 adalah konsisten. Kemudian nilai konsisten juga didapatkan oleh perbandingan antar indikator fasilitas pelayana (level 2) dengan nilai CR 0,00. Begitupun juga perbandingan yang lain antar indikator aksesibilitas, kelembagaan dan bisnis masing-masing bisa dikatakan konsisten

SIMPULAN

Berdasarkan perhitungan AHP dalam penentuan faktor proritas dalam pengembangan Desa Panusupan pasca panedmi covid-19 menunjukkan bahwa aspek fasilitas pelayanan merupakan aspek yang pertama harus diprioritaskan oleh pihak desa ataupun pengelola wisata dengan nilai prioritas 35%. Aspek fasilitas pelayanan terdiri dari beberapa kriteria yakni tempat ibadah, pusat informasi, pemandu wisata, medis dan toilet umum. kemudian untuk aspek kedua yang harus diprioritaskan adalah aspek kelembagaan (25%), ketiga aksesibilitas (24%), keempat pemasaran (11%) dan aspek yang terakhir adalah aspek bisnis (5%).

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, P., & Adi Nugraha, G. (2019). Pengembangan wisata kabupaten pemalang bagian selatan : Pendekatan analisis potensi dan daya tarik. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*.
- Oka Yoeti. (2008). *Pengantar Ilmu Pariwisata Edisi Revisi*. Angkasa.
- Saaty, T. L. (2005). Analytic Hierarchy Process. In *Encyclopedia of Biostatistics*. <https://doi.org/10.1002/0470011815.b2a4a002>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Thomas L. Saaty. (2005). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. In MacGraw Hill (Ed.), *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation* (pp. 426–447). Interbasional Book Company.